

MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN SEJARAH

Agustinus Ufie

Universitas Pattimurra

Abstrak: Kajian ini, sesungguhnya mengungkapkan kekhawatiran tentang semakin rapuhnya semangat keberagaman kita sebagai suatu *nation*, konflik, kekerasan dan berbagai situasi sosial kemasyarakatan lainnya yang terus merongrong identitas kebangsaan kita. Semua fenomena ini terjadi karena ketidakmampuan kita untuk mengapresiasi, mengartikulasikan keberagaman dalam semangat persatuan, secara konkrit dalam semua lini kehidupan kita. Berbagai gerakan dan upaya dalam mempertahankan identitas kebangsaan dan mengkonkritkan keberagaman sebagai sebuah kekuatan bangsa terus digalakkan. Hal ini tentunya tidak semudah membalik telapak tangan namun paling tidak proses kearah penyadaran bahwa bangsa ini ada karena kepelbagaian dan keragaman mulai menunjukkan kekuatannya. Mengintegrasikan nilai-nilai multikultural berbasil kearifan lokal dalam pembelajaran disekolah-sekolah melalui mata pelajaran yang relevan harusnya sesegera mungkin dilakukan. Dengan demikian maka iklim kebersamaan, dalam tata pergaulan yang lebih demokratis, humanis, toleran dan etis demi Indonesian yang kita cintai dapat dijumpai dimana-mana. Sektor pendidikan merupakan wadah yang sangat strategis karena sesungguhnya masa depan bangsa dan keberagaman ini terletak pada para siswa generasi muda bangsa ini. Menyadarkan kaum muda untuk terus menjunjung tinggi toleransi, kerja sama, mengasihi, hormat menghormati, rasa kebangsaan dan sebagainya adalah cara kita untuk memperkuat kohesi sosial serta memperkokoh integrasi bangsa sehingga konflik sosial yang terus terjadi dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dapat dieliminir bahkan dihentikan. Dengan demikian Indonesia yang kita impikan adalah Indonesia yang rukun dan damai, maju, mandiri dan bersahaja dalam keberagaman sebagai identitas dapat terwujud.

Kata kunci : Nilai-nilai multikulturalisme, kearifan lokal, sumber pembelajaran sejarah.

PENDAHULUAN

Menghadapi perubahan sosial yang semakin cepat diakibatkan karena perkembangan serta kemajuan dunia. Pendidikan menempati posisi strategis karena pendidikan menjadi energi besar yang menggerakkan perubahan dimaksud. Pendidikan juga dipandang sebagai lokomotif perubahan sosial dan peradaban masa depan masyarakat bangsa. Dengan demikian maka diharapkan pendidikan harus mampu mengakomodasi berbagai ide dan fenomena sosial yang berkembang sehingga pada gilirannya semua persoalan bangsa bisa tertata secara baik.

Diantara sekian banyak tantangan global peradaban masa depan multikulturalisme merupakan sebuah trend yang terus diperbincangkan (Tilaar, 2004;3). Bangsa Indonesia sekarang ini telah menyadari bahwa multikulturalisme merupakan sebuah keniscayaan karena bangsa Indonesia relatif memiliki banyak keragaman (kultur, tradisi, agama, suku). Olehnya itu keberagaman yang merupakan identitas masyarakat pluralistik harus menjadi kekuatan penyatu dalam kepelbagaian. Dalam konteks inilah kurikulum pendidikan sejarah yang dikembangkan haruslah memperhitungkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan serta kebutuhan masyarakat lokal yang terjewantahkan dalam apa yang dinamakan kearifan lokal sebagai penyangga utama multikulturalisme. Karena hanya dengan cara inilah berbagai gesekan yang berujung pada konflik sosial dan pertentangan kepentingan sebagai akibat dari kepelbagaian yang salah dikelola bisa diminimalisir.

Harus disadari bahwa kepelbagaian atau keragaman masyarakat

inilah yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa besar yang unik dan menarik bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Menurut Wiriaatmadja (2002;151) bahwa masyarakat bangsa Indonesia seperti dalam Bhineka Tunggal Ika, menggambarkan berbagai bentuk keragaman, seperti etnik, bahasa, adat kebiasaan, kebudayaan dan agama adalah satu dengan kesetaraan dalam jenis perbedaan itu. Sejalan dengan itu menurut Sya'faat (Matitaputty, 2010;1) mengungkapkan bahwa :

Secara teoritik keragaman budaya (multikultural merupakan konfigurasi budaya (cultural configuration) yang mencerminkan jati diri bangsa, secara empirik menjadi unsur pembentukan NKRI. Selain itu kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya (cultur capital) dan kekuatan budaya (cultur power) yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kemajemukan itu seakan-akan diabaikan oleh masyarakat Indonesia sehingga budaya Indonesia lebih dihargai oleh negara lain, salah satu faktor karena kurangnya perhatian dari masyarakat Indonesia. Karena itu, kebudayaan suatu bangsa harus dikuatkan agar bangsa tersebut dapat terangkat selain dianggap oleh bangsa lain.

Fakta empiris dari berbagai fenomena kehidupan bangsa kita belakangan ini menunjukan dengan jelas bahwa keberagaman kita memasuki momentum yang sangat mengkhawatirkan, tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sebuah entitas masyarakat lokal dan nilai-nilai modernisasi sebagai entitas masyarakat global sangat bersinggungan

dan sulit untuk disatukan apalagi diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat kita. Hal yang perlu untuk disadari bersama dalam semangat kebangsaan adalah ketika kita tidak mampu untuk mengelola secara baik dan sistematis tantangan itu maka akan terjadi gesekan-gesekan kepentingan yang berujung pada disharmoni sosial yang mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Pilihan untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran sejarah menjadi penting selanjut dengan semangat pendidikan sejarah yang terungkap dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan sejarah, bahwa dalam pembelajaran siswa tidak sebagai objek yang hanya dituntut untuk menyerap berbagai informasi yang diberikan guru, tetapi menjadi subjek belajar yang memiliki keluasaan untuk mengoptimalkan berbagai kemampuan yang dimiliki untuk dapat dikembangkan. Sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini (Depdiknas, 2003). Seirama dengan itu Wiriaatmadja (2002;294) menyatakan bahwa sejarah tidak dapat dipisahkan dari pendidikan ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*) yang dapat melatih unsur berfikir, memberikan kesadaran kepada kita akan nilai-nilai yang telah manusia lahirkan dan temukan melalui pikiran, perasaan atau perbuatannya.

Dengan demikian mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam pembelajaran sejarah patut dilaksanakan dalam rangka membentuk sikap dan karakter siswa sehingga melalui para siswa nilai-nilai kebersamaan,

toleransi, rasa kebangsaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan diyakini memiliki kekuatan dalam menyatuhkan kepelbagaian serta merekatkan kohesi sosial pada masyarakat lokal wujud konkrit dari kearifan lokal, perlu diaplikasikan dalam kehidupannya sebagai warga masyarakat bangsa yang pada gilirannya diharapkan disharmoni sosial akibat dari keragaman yang salah dikelola dapat diatasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamid Hasan (2012; 108) bahwa proses pendidikan sejarah diarahkan untuk membangun kemampuan para peserta didik untuk mengidentifikasi jati diri pribadinya dan jati diri bangsanya. Hal ini sejalan dengan Sartono Kartodirdjo (Hamid Hasan, 2012; 109) bahwa pentingnya identitas sebagai bangsa untuk menjawab siapa diri kita maka keragaman budaya adalah bagian dari siapa diri kita tersebut. Untuk menjawab itu maka kurikulum pendidikan sejarah semenjak bangsa ini diproklamkan hingga kini masih terus dikembangkan dengan berbagai macam pendekatan kepentingan dan perkembangan (politik, ekonomi, ilmu pengetahuan). Berbagai upaya itu dimaksudkan untuk perbaikan pendidikan bangsa ke arah yang lebih baik, sehingga input maupun output pendidikan kita dapat berdaya guna bagi pemenuhan kebutuhan serta kepentingan hidup masyarakat bangsa ini.

Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum pendidikan secara umum dan kurikulum pendidikan sejarah khususnya harus mengakomodasi semua kepentingan serta kebutuhan kepelbagaian masyarakat baik lokal maupun nasional. Proses kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan merupakan implementasi dari dokumen kurikulum (*curriculum*

document) yang tertulis (written curriculum) dalam kurikulum yang berlaku disetiap satuan pendidikan. Berdasarkan langkah-langkah pengembangan silabus yang tercantum dalam dokumen penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikeluarkan BSNP (2006;16) dinyatakan bahwa kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Secara operasional silabus dijabarkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. Untuk itu Hamid Hasan (2012;7) menjelaskan bahwa pendidikan sejarah sudah berkembang mengarah kepada pemahaman secara mendalam berbagai peristiwa sejarah yang dianggap penting untuk membangun kemampuan berpikir kritis, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, kepedulian sosial dan semangat kebangsaan.

Mengimplementasikan nilai-nilai multikulturalisme yang terlahir dari berbagai tradisi, budaya masyarakat lokal harus menjadi sumber penting dalam dunia pendidikan terlebih pendidikan sejarahnya karena pembelajaran sejarah yang mengesampingkan budaya, tradisi lokal (kearifan lokal) akan menyisahkan persoalan besar dalam tatanan kehidupan bersama sebagai suatu bangsa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamid Hasan (2012;104) bahwa:

Keanekaragaman budaya disatu pihak merupakan suatu kekayaan bangsa tetapi di pihak lain dapat menjadi sumber

konflik yang tidak menguntungkan. Pendidikan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik sehingga dapat mengubah perbedaan budaya dari potensi sumber konflik menjadi potensi sumber kerjasama yang produktif dan sumber inspirasi bagi budaya lain.

Pendidikan sejarah harus mengakomodasi kebutuhan pluralisme yang berdasar pada tradisi serta budaya lokal dan terakumulasi sebagai kearifan lokal pada berbagai level pendidikan akan mencapai tujuannya sesuai tujuan pendidikan nasional. Maka kurikulum yang dikembangkan oleh para pengembang kurikulum sebagai kerangka, pedoman, penuntun jalan dalam proses belajar mengajar mata pelajaran sejarah disekolah harus mampu menjawab semua keberagaman yang ada dalam kehidupan masyarakat bangsa ini. Sebagaimana yang diungkapkan Hamid Hasan (2012; 103-104) bahwa :

Pada tingkat nasional para pengembang pendidikan sejarah haruslah berdasarkan keberagaman budaya yang ada. Pendidikan sejarah haruslah mengembangkan dan memperkuat jati diri bangsa berdasarkan keragaman budaya yang ada. Dalam memperkuat jati diri bangsa tersebut, pendidikan sejarah haruslah mampu membangun penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada keragaman budaya serta memperkuat persamaan diantara keragaman budaya tersebut. Pendidikan sejarah tidak boleh menjadi media pendidikan yang mengabaikan keragaman budaya dan mencoba untuk membangun suatu budaya monolith.

Olehnya itu pendidikan sejarah penting untuk dibelajarkan pada semua peserta didik pada berbagai jenjang. Multikulturalisme sebagai manifestasi dari keberagaman sejarah, budaya dan tradisi masyarakat lokal harus diperkenalkan dalam pembelajaran sejarah nasional. Menurut Dadang Supardan (2004;262) bahwa pembelajaran sejarah lokal perlu diperkenalkan kepada siswa untuk mengenali identitas kelokalanya maupun menghargai identitas etnis/daerah lain yang ada di Indonesia dengan mempertimbangkan asas belajar dan tahap perkembangan siswa.

Sejalan dengan perubahan peraturan sistim pendidikan yang diartikulasikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian diterjemahkan lebih lanjut dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dioperasionalkan secara konkrit berupa Permen Diknas masing dengan nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006 disana sangat jelas ruang untuk pengembangan multikultural terbuka untuk dikembangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dimana kewenangan diberikan kepada otoritas pendidikan tingkat sekolah untuk memikirkan, menyiapkan dan mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan khasanah tradisi, budaya (kearifan lokal) daerah tersebut. Sehubungan dengan itu Desfina (Supriatna dan Wiyanrti, 2008;208) mengatakan bahwa :

Kurikulum memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah dalam mengembangkan silabus pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungannya. Ini menandakan bahwa

salah satu upaya pemerintah untuk menggali serta mengembangkan potensi daerah sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan sekolah/masyarakat setempat.

Dengan demikian maka nilai-nilai multikultural yang berdasar pada kearifan lokal harus mendapat tempat dalam proses pengembangan pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah.

Kajian Teoritik

a. Konsep Nilai

Menurut Fraenkel (1977;17) mengungkapkan definisi nilai adalah standar tingka laku, keindahan, keadilan, kebenaran dan efesiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipertahankan. Pengertian ini sangat jelas menunjukan hubungan antara subjek dan objek sangat erat, penting dalam kehidupan bersama. Misalnya segenggam garam dimasyarakat Dayak lebih berarti dari pada segumpal emas, karena garam sangat berarti dalam hidup matinya orang Dayak, bagi orang Yogyakarta sekarung garam tidak ada artinya bila dibandingkan dengan satu ons emas karena emas memiliki arti penting bagi orang kota. Dengan demikian nilai memiliki esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia.

Sementara itu Budiyo (2007;75) menjelaskan bahwa nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap serta bertindak laku. Nilai bersifat materil dan imateril. Nilai imateril tidak konkrit atau tidak dapat

ditangkap dengan panca indra namun dapat dirasakan. Wujud yang lebih konkrit dari konsep nilai imateril dalam kehidupan masyarakat adalah apa yang dikenal dengan norma, tatanan sikap hidup masyarakat.

Kusumohamidjojo (2009;150) mengemukakan bahwa nilai sebagai suatu harkat yaitu kualitas suatu hal yang dapat dijadikan hal itu disukai, diinginkan, berguna atau dapat menjadi objek kepentingan.

Jadi nilai adalah sesuatu yang penting, paling dianggap baik, dihargai tinggi, harus diterapkan, harus dicapai atau paling tidak diaspirasikan.

b. Multikulturalisme dan Pengembangannya

Multikulturalisme merupakan institusionalisasi dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di dalam suatu *nation state* melalui bahasa, bidang-bidang atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan, pendidikan dan bidang lainnya (Tilaar, 2004;84) ini artinya bahwa multikulturalisme merupakan suatu paham yang menyakini bahwa perbedaan dan keberagaman dalam suatu budaya memiliki nilai kebersamaan. Keberagaman dan perbedaan merupakan kekuatan, dalam kehidupan sosial politik keberagaman dan perbedaan terpancar melalui demokrasi karena demokrasi sesungguhnya merupakan salah satu roh yang menjamin budaya multikulturalisme dimaksud.

Sejalan dengan itu, Suparlan (2002;2) menyebutkan bahwa dalam

multikulturalisme masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Didalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat yang lebih kecil, membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti mosaik tersebut.

Model multikulturalisme sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendisain apa yang dinamakan “kebudayaan bangsa” sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi “kebudayaan bangsa Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Sementara itu multikulturalisme menurut Kymlicka (2002: 50) merupakan penghargaan etnik dan budaya mayoritas terhadap minoritas.

Penghargaan atas kepelbagaian ini merupakan suatu realitas yang harus dikelola secara baik dalam menata kehidupan bersama bangsa ini. Multikulturalisme (a) ia merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang heterogen, krn dari segi ini sebanyak 95 % negara-negara di dunia pada dasarnya adalah bersifat multikultural mengingat secara etnis dan budaya bersifat plural; (b) Multikulturalisme telah diangkat sebagai suatu keyakinan, ideologi, sikap, maupun kebijakan yang menghargai pluralisme etnik dan budayanya sebagai sesuatu yang berharga, potensial, yang harus dipelihara dan ditumbuhkembangkan. (Stevenhagen, 1986).

Lebih lanjut dan sangat jelas multikulturalisme adalah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (Blum, 2001:16).

c. Kearifan Lokal (*local wisdom*) sebagai Entitas Masyarakat Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu kebutuhan yang harus terus dikembangkan. Olehnya itu kearifan lokal menurut Mutakin (2005:43) diartikan sebagai kemampuan berfikir, berasa, bersikap dan bertindak seseorang atau kelompok orang dalam upaya memperkenalkan dan menanam ide, konsep, gagasan, harapan, anjuran atau sejumlah informasi yang berkenaan dengan nilai-nilai dan norma-norma sebagai acuan tentang bagaimana selayaknya hidup dan kehidupan dikembangkan, dinikmati sehingga bermakna dan bermanfaat bagi individu yang bersangkutan serta lingkungannya. Dengan demikian maka desintegrasi dalam kehidupan sosial senantiasa dapat dihindarkan.

Sementara itu Sutarto (2006:1) menyebutkan bahwa kearifan atau kecendikiaan lokal (adat) yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bagian sentral dari tradisi. Lebih lanjut Sutarto menjelaskan bahwa

tradisi adalah kebiasaan turun temurun yang mencerminkan keberadaan para pendukungnya.

Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal (Saini KM, 2005).

Pertumbuhan dan perkembangan elemen ini sangat penting untuk memperkuat kohesi sosial di antara warga masyarakat. Dengan demikian maka untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa adalah dengan memperkenalkan budaya lokal kepada anak didik kita. Nilai-nilai budaya lokal ini adalah jiwa dari kebudayaan lokal dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan di daerahnya yang sekaligus merupakan khasanah budaya nasional.

d. Pendidikan Sejarah dalam Pusaran Kurikulum.

Seiring dengan perkembangan, kurikulum pun terus berkembang dari saat ke saat hal ini terbukti dengan terus dikembangkan kurikulum yang sangat menyita perhatian dunia pendidikan. Dua model kurikulum yang lahir belakangan ini yaitu KTSP dan kemudian direvisi dengan K 13 yang lahir dari semangat UU Otonomi Daerah telah memberikan ruang yang sangat luas kepada penyelenggara pendidikan pada level operasional yaitu sekolah dan guru. Terlepas dari

berbagai kontroversi dan perdebatan menyangkut kurikulum yang terus berganti dan menyisahkan kebingungan diseantero jagat nusantara bagaikan penyakit ebola yang mewabah di Afrika. Berbicara soal kurikulum maka tentunya harus di dudukan apa sesungguhnya konsep, pengertian kurikulum dari kurikulum itu sendiri. Olehnya itu, kurikulum sebagaimana yang diungkapkan Nasution. S. (2008;5) bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.

Sementara itu Nana Sudjana (2005) menjelaskan bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah. Sejalan dengan itu UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19 mendefenisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran dapat ditemukan dari definisi yang dikemukakan oleh Robert M. Hutchins (1936) yang menyatakan bahwa:

the curriculum should include grammar, reading, the toric and logic, and mathematic and addition at the secondary level introduce the great books of the western world.

Kurikulum sebagaimana yang diungkapkan oleh Klein (1999) dalam Hamid Hasan (2012;20) adalah merupakan "*the heart of education*". Olehnya itu lebih konkrit menurut Hamid Hasan (2012; 20) bahwa sebagai jantung pendidikan maka kurikulum harus dapat melaksanakan fungsi pendidikan dalam mengembangkan potensi individu bagi kehidupan bangsa yang lebih baik, lebih terhormat, lebih berwibawa, lebih produktif, lebih mensejahterakan dibandingkan masa kini. Kurikulum diperlukan untuk membangun masa depan, di mana kehidupan masa lalu, masa sekarang dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan sebagaimana yang ditegaskan Hamid Hasan, (Supriatna Nana, 2007; 33).

Secara konseptual kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda bangsa bagi kehidupan yang lebih baik untuk dirinya, masyarakatnya dan bangsa di masa mendatang dibandingkan dengan masa kini (Hamid Hasan, 2012; 19).

Kurikulum pendidikan sejarah yang mengabaikan rasa kebangsaan, berfikir sejarah, ketrampilan sejarah serta wawasan global (*internasional*) pada proses belajar mengajar sejarah sangat berdampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*) maupun warga negara dunia (*world state*).

PEMBAHASAN

a. Multikulturalisme dan Kearifan Lokal.

Konsep multikultural yang merupakan manifestasi dari berbagai budaya, tradisi dan juga sejarah lokal yang terakumulasi mejadi kearifan masyarakat lokal sesungguhnya harus dijadikan sumber dalam pendidikansejarah.Kesadaran sejarah merupakan bagian peningkat multikultural dalam suatu bangsa.Oleh karena itu pendidikan sejarah berperan penting dalam internalisasi dan pembangunan kesadaran keberagaman sebagai roh dari multikultural.Menurut Banks and Banks (1995;2) menyatakan bahwa pendidikan multikultural menekankan pada kesederajatan dalam kesempatan pendidikan kepada masyarakat dan memasukan seluruh partisipasi siswa dalam berbagai hal. Sementara itu Musa Asy'arie (2004;1) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya bangsa yang hidup ditengah-tengah masyarakat plural. Dengan demikian maka pengembangan konsep multikultural dalam dunia pendidikan kita adalah hal yang sangat penting dilaksanakan, hal ini sangat dimungkinkan karena kebijakan kurikulum kita memberikan tempat untuk itu. Berkaitan dengan konsep pengembangan pendidikan multikultural dimaksud maka H.A.R. Tilaar(2004;185-191) menawarkan enam konsep yang hendak dikembangkan yaitu:

1. *Right to culture* dan identitas budaya lokal, sebagai manifestasi jawaban globalisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menunjukan identitas kebudayaan.
2. Kebudayaan Indonesia-yang-menjadi, yakni mewujudkan sistem nilai ke Indonesiaan ditengah sistem keberagaman.
3. Konsep pendidikan multikultural normatif, bukan sekedar deskriptif. Pendidikan multikultural normatif tidak hanya mendeskripsikan adanya pluralitas, melainkan misi untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa.
4. Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, yakni sebagai alat untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini.
5. Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru, yang tidak hanya terbatas dalam pendidikan sekolah. Pedagogik baru telah mengembangkan pemberdayaan dan kesetaraan sesama manusia dengan keberagaman budaya.
6. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa.

Dengan demikian maka lembaga-lembaga pendidikan kita haruslah mengembangkan pendidikannya berdasar pada konsep pengembangan nilai-nilai multikultural yang terakomodir dalam pembelajaran sejarah.Realitas pendidikan di Indonesia sekarang ini menunjukan bahwa belum ada mata pelajaran multikulturalisme.Atas dasar itu maka konsep pendidikan

multikulturalisme sebagai manifestasi dari keragaman budaya, tradisi dan sejarah lokal (kearifan lokal) dapat dikembangkan melalui beberapa mata pelajaran yang dianggap relevan seperti sejarah, PPkn, sosiologi antropologi, bahasa dan kebudayaan. Pengembangan konsep pendidikan multikultural membutuhkan peran seluruh komponen yang terkait dalam sistim pendidikan kita. Konsep multikulturalisme yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal bukanlah sebuah konsep hampa yang terus menerus didengungkan bila ada berbagai gejolak menimpa keberagaman dan kemajemukan kita, tetapi konsep ini hendaknya dimanifestasikan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan kita, terutama dunia pendidikan.

b. Integrasi Nilai-Nilai Multikultural berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Sejarah

Para ahli pendidikan dan kurikulum telah menempatkan sosial budaya sebagai salah satu landasan penting dalam pengembangan kurikulum (Zais, 1976:180). Ini mengandung makna bahwa kehidupan sosial budaya sangat berperan penting dalam mewarnai pengembangan kurikulum kita, olehnya itu proses pengembangan kurikulum disetiap jenjang pendidikan haruslah memperhatikan keragaman yang ada dalam masyarakat. Konsep pendidikan multikultural dipandang sebagai sebuah ide yang semestinya dapat dijadikan landasan sosial dalam pengembangan kurikulum

pendidikan sejarah dengan memperhatikan nilai-nilai demokratis, pluralistik, humanis serta toleransi untuk diajarkan kepada para siswa terutama dalam mata pelajaran sejarah di SMA.

Secara konkrit prinsip-prinsip atau nilai-nilai itu haruslah diterjemahkan dalam pembelajaran oleh guru mata pelajaran sejarah melalui silabus, RPP sebagai pedoman operasional pembelajaran di kelas. Guru hendaknya mampu menterjemahkan nilai-nilai multikultural secara lebih konkrit dalam materi pembelajaran sejarah misalnya topik kebangkitan nasional maka nilai yang hendak dimunculkan semangat kebersamaan, toleransi, rasa senasib dan sepenanggungan para tokoh-tokoh pejuang kalah itu. Nilai-nilai inilah yang akan menyemangati, membentuk sikap serta membangkitkan rasa kebangsaan peserta didik melalui pembelajaran sejarah. Nilai-nilai lain seperti misalnya tenggang rasa antar siswa, sikap tolong menolong, menghilangkan perasaan minder antara siswa miskin dan kaya, menghormati kepelbagaian, toleransi, saling menghormati tentunya sangat diharapkan dalam proses pembelajaran di kelas.

Dalam konteks kelokalan maka filosofi budaya, tradisi lokal yang telah menjadi kekuatan, semangat, pengikat serta penuntun kehidupan bersama masyarakat lokal harus juga menjadi sumber dalam pembelajaran sejarah misalnya nilai *budaya pela gandong* di Maluku, semangat *tradisi nulung kanu butuh*,

nalang kanu susah pada masyarakat Sunda, atau budaya maren masyarakat adat suku Kei dan lain sebagainya. Kalau hal ini terjadi maka pembelajaran sejarah bukan hanya sekedar *transfer of knowledge* tetapi juga *transfer of value* artinya bahwa bukan sekedar membelajarkan siswa menjadi cerdas, tetapi juga berakhlak mulia.

Dengan demikian maka pembelajaran sejarah bukan hanya untuk mengembangkan keilmuan tetapi juga mempunyai fungsi didaktis. Sejalan dengan itu Hamid Hasan (2012;108) menyatakan bahwa pendekatan multikultural harus membantu para pengembang kurikulum sejarah dalam menetapkan prinsip-prinsip kurikulum, pengembangan materi dan proses pembelajaran sejarah yang dapat *maximise the potentials of students anda their cultural enviroment so that the students can learn better*.

Lebih jauh Hamid Hasan (2012;108) dalam buku Pendidikan Sejarah Indonesia Isu dalam Ide dan Pembelajaran menyatakan bahwa :

Pendekatan multikultural dalam kurikulum sejarah harus mengakomodasi perbedaan kultural peserta didik, memanfaatkan kebudayaan itu sebagai sumber konten dan sebagai titik berangkat untuk pengembangan kebudayaan, pemahaman terhadap kebudayaan orang lain, toleransi, membangkitkan semangat kebangsaan berdasarkan Bhineka Tunggal Ika, mengembangkan prilaku yang etis dan dapat memanfaatkan kebudayaan pribadi sebagai bagian dari entry behavior siswa sehingga

dapat menciptakan kesempatan yang sama bagi siswa untuk berprestasi.

Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural berbasis kearifan lokal di dalam kurikulum sejarah sangat diperlukan untuk mengurangi berbagai prasangka di dalam perlakuan dan tingkah laku rasial dari etnis-etnis tertentu ataupun perlakuan menyimpang dari siswa-siswa tersebut.

Dengan demikian maka hendak saya kemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan multikultur yang berbasis pada kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran sejarah di SMA dapat dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Hal ini sesungguhnya menjadi kewenangan para guru mata pelajaran sejarah karena kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) mengamanatkan hal dimaksud. Penerapan atau pengintegrasian nilai-nilai multikultur berbasis kearifan lokal secara jelas terlihat dalam silabus dan RPP dari guru mata pelajaran sejarah. Melalui cara itu, tentunya nilai-nilai multikultural berbasis kearifan lokal akan terimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas secara kontekstual.

Selain itu, pendidikan multikultur juga bukan mata pelajaran terpisah sehingga harus terintegrasi dan bukan merupakan pengetahuan yang bersifat kognitif sehingga materi multikulturalisme dan kearifan dikemas dalam bentuk afektif dan kinerja siswa dengan pendekatan bersifat tematis. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini

adalah upaya menerapkan atau mengintegrasikan muatan nilai-nilai yang terkandung dalam multikultur dan kearifan lokal kedalam mata pelajaran melalui kegiatan sehingga dapat diterapkan dan tercermin dalam kehidupan peserta didik. Selain itu, penerapan atau pengintegrasian pendidikan multikultur berbasis kearifan lokal harus dilakukan dan terlihat dalam aktivitas seluruh warga sekolah maupun dalam manajemen sekolah secara umum (Pusat Kurikulum Depdiknas 2007).

c. Nilai-Nilai Multikultural dan Kearifan Lokal untuk Mengembangkan diri siswa.

Merujuk pada Permen Diknas No. 22 tahun 2006 maka pengembangan diri dan muatan lokal sebagai bagian dari struktur kurikulum yang harus dikembangkan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Secara umum muatan lokal berisikan tentang tradisi lokal, budaya lokal (kearifan lokal) bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional (BSNP, 2006).

Haruslah disadari bahwa pengembangan, pembentukan watak serta kepribadian siswa bukan hanya terjadi melalui proses pembelajaran di kelas namun berbagai kegiatan pendidikan diluar mata pelajaran juga turut berperan dalam pengembangan

diri siswa, proses pembelajaran diluar kelas ini merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan di sekolah. Kegiatan-kegiatan diluar mata pelajaran dimaksud seperti (1) kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling (2) kegiatan ekstrakurikuler (3) kegiatan unit-unit kerohanian. Yang kesemuanya itu tentunya dapat menunjang kepribadian, kreatifitas siswa.

Dalam kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai multikultural melalui kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah maka internalisasi nilai-nilai tersebut dapat melalui pengembangan konten muatan lokal dan pengembangan diri seperti (1) sikap apresiatif terhadap keragaman budaya bangsa kita sehingga muncul sikap kearifan lokal terhadap keragaman yang pada gilirannya akan meminimalisir sikap primordialisme dikalangan siswa (2) penciptaan iklim humanis, etis dan pluralistik di sekolah seperti kegiatan kepramukaan, pementasan seni dan budaya nasional, kegiatan ekstra keagamaan. Semua bentuk kegiatan dimaksud merupakan proses pengembangan sikap, perilaku baik mental maupun rohani siswa yang pada gilirannya diharapkan muncul pemikiran-pemikiran cerdas dalam mengelolah keberagaman bangsa ini secara baik dalam kehidupan bersama di lingkungan masyarakat lokal maupun nasional.

PENUTUP

Indonesia adalah negara multikultural terbesar didunia, keberagaman budaya, suku, ras dan agama bangsa ini merupakan suatu kekayaan dan keunikan sekaligus anugerah terbesar yang harus kita syukuri namun sangat disadari bahwa keberagaman itu dalam realitas sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang hari-hari ini dengan mata terbuka kita menyaksikan konflik antar suku, kelompok, agama, pelanggaran HAM, dominasi satu kelompok atas kelompok lain, sikap primordialisme yang berlebihan, konsep otonomi yang salah diterjemahkan, carut marut politik kebangsaan, premanisme, geng motor, ormas-ormas arogan yang semuanya sangat mengguncangkan sendi-sendi keberagaman sebagai identitas bangsa kita. Hal ini tentunya berdampak pada munculnya berbagai reaksi dan tuntutan dari sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari negara kesatuan, semangat sebagai suatu *nation state* menampilkan sinyal yang menggelisahkan. Semua fenomena ini terjadi karena ketidakmampuan kita untuk mengapresiasi, mengartikulasikan keberagaman dalam semangat persatuan, kepelbagaian secara konkrit sebagai kekuatan dalam semua lini kehidupan kita.

Sayup-sayup kita mendengar, merasakan bahwa gugatan atas konsep nasionalisme dalam keberagaman mulai menemukan jalannya. Berbagai gerakan dan upaya untuk terus mempertahankan empat pilar kebangsaan dan mengkongkritkan keberagaman sebagai sebuah kekuatan bangsa melalui

pendidikan terus dikembangkan. Hal ini tentunya tidak semudah membalik telapak tangan namun paling tidak proses kearah penyadaran bahwa bangsa ini ada karena kepelbagaian dan keragaman mulai menunjukan kekuatannya.

Mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran disekolah-sekolah melalui mata pelajaran yang relevan harusnya sesegera mungkin karena itu adalah wujud konkrit dari semangat untuk terus mempertahankan keberagaman sebagai identitas bangsa kita. Konsep mengembangkan nilai-nilai multikultural berbasis kearifan lokal melalui pendidikan dengan mengintegrasikan dalam materi pembelajaran sebagaimana yang diinginkan oleh kurikulum merupakan hal penting yang patut dilaksanakan sehingga konsep multikulturalisme dan kearifan lokal bukan hanya sebagai slogan semata namun dapat direalisasikan. Dengan demikian maka iklim kebersamaan, dalam tata pergaulan yang lebih demokratis, humanis, toleran dan etis demi Indonesian yang kita cintai dapat dijumpai dimanamana.

Sektor pendidikan merupakan wadah yang sangat strategis karena sesungguhnya masa depan bangsa dan keberagaman ini terletak pada para siswa generasi muda bangsa ini. Menyadarkan kaum muda untuk terus menjunjung tinggi toleransi, kerja sama, mengasihi, hormat menghormati, rasa kebangsaan dan sebagainya adalah cara kita untuk memperkuat kohesi sosial serta memperkokoh integrasi bangsa sehingga konflik sosial yang terus terjadi dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dapat dieliminir bahkan dihentikan. Dengan demikian Indonesia yang kita impikan adalah Indonesia yang

rukun dan damai, maju, mandiri dan bersahaja dalam keberagaman sebagai identitas dapat terwujud. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono. 2007. *Nilai-Nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia*; Bandung: Alfa Beta.
- Blum. A. Lawrence. 2001. *Antirasisme, Multikulturalisme dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi sebuah Masyarakat Multikultural*, dalam Larry May dan Shari Collins Chobanian, *Etika Terapan : Sebuah Pendekatan Multikultural*, Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Fraenkel, J.R. 1977. *How to Teach About Values; An Analytic Approach*; New Jersey; Prentice-Hall, Inc.
- Hamid, Hasan. 2012. *Pendidikan Sejarah Indonesia, Isu dalam Ide dan Pembelajaran*. Bandung: Rizqi Press.
- (2003: 31 Agustus). *Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional*. [Online] Tersedia: http://www.pdk.go.id/balitbang/Publikasi/Jurnal/No_026/pendekatan_hamid_hasan.htm [01 Mei 2012]
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2009. *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia*; Jogjakarta: Jalasutra.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*, Terjemahan Edlina Hafmini Eddin. Jakarta: LP3ES.
- Mutakin, Awam. 2005. *Nilai-Nilai Kearifan Adat dan Tradisi di Balik Simbol (Totem) Kuda Kuningan*; Universitas Pendidikan Indonesia.
- Supardan, Dadang. 2004. *Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global untuk Integrasi Bangsa*. Disertasi Doktor pada SPs Bandung. Tidak Diterbitkan.
- Stavenhagen, R. 1986. *Problems and Prospects of Multiethnic State*. Tokyo: United Nations University Press.
- Syafa'at, Rachmad, dkk. 2008. *Negara Masyarakat dan Kearifan Lokal*; Malang: In-Trans Publishing.
- Supriatna, dan Wiyanarti. 2008. *Sejarah dalam Keberagaman*; Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*; Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- . 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*; Jakarta; Rineka Cipta.
- Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Jakarta Depdiknas.

- Wiriaatmadja, Rochiaty. 2002. *Pendidikan Sejarah di Indonesia Perspektif Lokal, Nasional dan Global*; Bandung: Historia Utama Press. Universitas Pendidikan Indonesia.